

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI**

#### **2.1 Sejarah Perusahaan**



Gambar 2. 1 Logo Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) merupakan Lembaga negara yang memiliki peranan strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya terkait dengan pengawasan pengelolaan keuangan negara. Didirikan pada 1 Januari 1947, BPK lahir dari amanat konstitusi, yaitu Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa keuangan negara harus diaudit oleh sebuah lembaga yang independen. Berdasarkan fungsinya, fungsi utama BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawabnya baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. BPK berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara demi memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan standar yang berlaku.

Pada tahap awal, BPK beroperasi di Magelang, Jawa Tengah dengan Raden Soerasno sebagai ketua pertama. Saat itu, Indonesia baru saja merdeka dan Tengah menghadapi situasi politik yang tidak stabil dan sumber daya yang terbatas, sehingga tantangan bagi BPK untuk menjalankan tugasnya sangatlah besar. Namun, BPK tetap berupaya menjalankan fungsinya dengan optimal dengan mengawasi keuangan negara meskipun kondisi pemerintahan dan birokrasi yang masih dalam

tahap awal pembentukan. Seiring dengan perjalanan waktu, kebutuhan akan lembaga pengawas yang independen semakin mendesak terutama di tengah berbagai dinamika politik, ekonomi dan hukum yang terjadi di Indonesia.

BPK mengalami berbagai transformasi kelembagaan termasuk saat Indonesia mengalami perubahan politik yang signifikan seperti Orde Baru dan Reformasi 1998. Pada masa Orde Baru, meskipun BPK tetap menjalankan fungsinya, pengawasan keuangan negara seringkali menghadapi tekanan politik. Namun, setelah reformasi 1998, peran BPK diperkuat melalui amandemen UUD 1945, di mana kemandirian Lembaga ditegaskan. Reformasi tersebut menandai perubahan penting dalam peran BPK, dengan memperluas lingkup pemeriksaan keuangan untuk mencakup pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan BUMD, serta lembaga yang menerima dan menggunakan anggaran negara.

Sebagai lembaga yang independen dari pengaruh lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, BPK memiliki otoritas untuk melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. BPK juga memberikan opini atas laporan keuangan tersebut. Pemberian opini ini didasarkan pada standar audit yang berlaku, serta menggambarkan tingkat kewajaran dan kepatuhan pengelolaan keuangan negara terhadap peraturan yang berlaku.

Di samping pemeriksaan keuangan, BPK juga menjalankan pemeriksaan kinerja entitas dan pemeriksaan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pemeriksaan kinerja dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pengelolaan keuangan milik negara, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan-tujuan tertentu lebih fokus pada investigasi atau pemeriksaan terhadap masalah-masalah spesifik yang membutuhkan audit lebih mendalam. Dengan semakin kompleksnya pengelolaan keuangan negara, BPK terus meningkatkan kapabilitasnya melalui penggunaan teknologi informasi dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional.

Hingga saat ini, BPK berperan penting dalam mendorong terbuatnya tata kelola pemerintahan yang efisien dan baik, terutama dalam

bidang pengelolaan keuangan negara. Laporan hasil pemeriksaan BPK sering menjadi acuan dalam proses legislasi, perencanaan anggaran, serta penyusunan kebijakan publik. Peran BPK tidak hanya penting pada tingkat nasional, namun juga pada tingkat internasional. Dimana BPK terlibat aktif dalam berbagai forum audit internasional dengan tujuan mengembangkan kapasitas audit, menyesuaikan dengan standar audit yang berlaku dan kolaborasi dengan lembaga audit internasional lainnya.

Secara keseluruhan, BPK-RI telah membuktikan peranannya sebagai lembaga independen yang mampu menjaga transparansi, akuntabilitas serta memastikan bahwa keuangan milik negara telah dikelola secara efektif dan bertanggung jawab. Peran BPK tidak hanya berkontribusi terhadap pengelolaan anggaran negara yang lebih baik, tetapi juga berperan dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi yang dapat merugikan negara serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

#### **2.1.1 Visi**

Menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

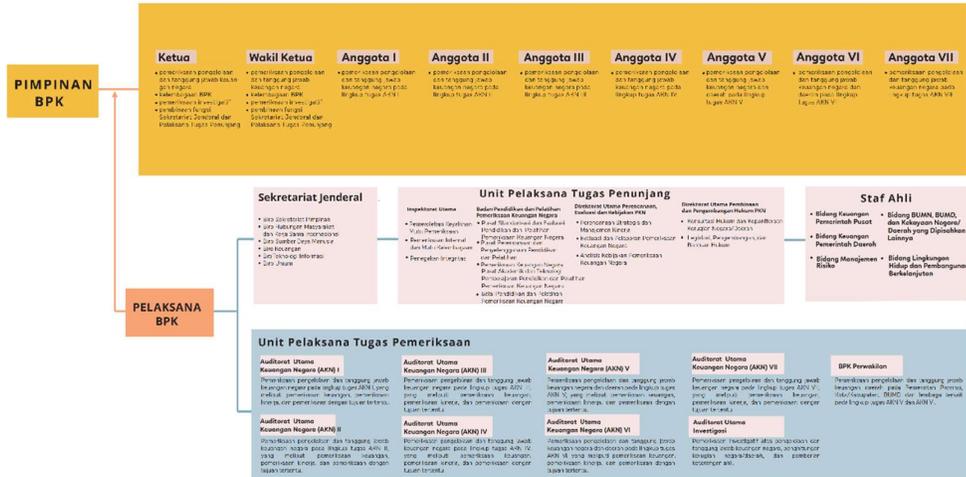
#### **2.1.2 Misi**

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara.
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

## 2.2 Struktur Organisasi



### STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki peranan strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara jelas, jujur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk menjalankan tugas ini, BPK memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Pimpinan BPK, yaitu Ketua, Wakil Ketua, serta tujuh anggota lainnya yang masing-masing bertanggung jawab atas bidang kerja yang spesifik. Berikut adalah penjelasan detail mengenai tugas dan tanggung jawab yang dipegang oleh setiap posisi dalam struktur tersebut:

#### 1. Ketua

Ketua merupakan pemimpin utama di BPK yang memiliki tanggung jawab atas keseluruhan proses pemeriksaan keuangan negara. Dalam peranannya, Ketua memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dengan standar profesionalisme yang tinggi. Tugas utama Ketua meliputi:

- Bekerjasama dengan Wakil Ketua untuk mengelola pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Membina hubungan kelembagaan yang baik di tingkat nasional maupun internasional guna menjaga dan memperkuat kerja sama serta memperluas wawasan BPK dalam pengawasan keuangan.
- Memberikan arahan strategis terhadap pemeriksaan yang bersifat investigatif.
- Memastikan koordinasi yang baik antara berbagai unit kerja untuk mencapai tujuan institusional BPK secara efektif.

## 2. Wakil Ketua

Wakil Ketua memiliki tugas untuk mendampingi Ketua dalam menjalankan tugasnya serta memiliki peran kunci dalam mengawasi pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara.

Beberapa tugas utama Wakil Ketua meliputi:

- Bekerjasama dengan Ketua untuk mengelola pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Mengawasi proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan keuangan negara yang memerlukan Keputusan hukum.

## 3. Anggota

Anggota dalam struktur organisasi milik BPK-RI adalah pejabat tinggi yang memiliki peranan strategis dalam menjalankan fungsi utama BPK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan milik negara. Anggota BPK berjumlah 7 orang dan setiap anggota memiliki tanggung jawab spesifik dalam memimpin unit kerja atau direktorat tertentu yang terkait dengan pemeriksaan atas laporan keuangan negara. Dalam kapasitasnya, anggota BPK bertindak sebagai pengarah dan pengawas terhadap penyelenggaraan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa yang berada di bawah koordinasinya. Selain itu, Anggota juga bertugas untuk menjamin bahwa seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan

negara yang memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas dan mematuhi ketentuan hukum. Anggota BPK juga memiliki tanggung jawab dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berisi rekomendasi strategis kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah, lembaga legislative dan masyarakat umum. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara, mencegah terjadinya penyimpangan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 4 ayat (1), pelaksana BPK terdiri dari beberapa unit kerja utama yang dirancang untuk mendukung operasional lembaga secara professional dan efisien. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing unit kerja beserta tanggung jawabnya yang lebih mendetail:

1. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal merupakan bagian vital dalam struktur organisasi BPK yang memiliki fungsi utama memberikan dukungan administrative dan teknis kepada pimpinan BPK. Dengan peran ini, Sekretariat Jenderal memastikan bahwa setiap proses dan kegiatan di dalam BPK dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan lembaga. Sekretariat Jenderal terdiri dari enam biro yang masing-masing memiliki tanggung jawab khusus:

- Biro Sekretariat Pimpinan

Biro ini menjadi penghubung utama dalam mendukung segala kebutuhan pimpinan BPK. Beberapa tanggung jawab pentingnya adalah:

- a. Menyusun dan mengelola jadwal serta agenda kegiatan pimpinan BPK, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
- b. Mengatur persiapan untuk rapat, pertemuan resmi dan acara lainnya yang melibatkan pimpinan BPK.

- c. Mengkoordinasikan komunikasi antara pimpinan dengan unit kerja lain di dalam maupun di luar organisasi.
- d. Memastikan seluruh kebutuhan administrative pimpinan seperti dokumen dan logistik tersedia secara tepat waktu dan terorganisasi dengan baik.
- Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional  
Biro ini memiliki peran strategis dalam membangun citra positif BPK serta menjalin kerja sama dengan entitas internasional. Tugas-tugas utamanya mencakup:
  - a. Menyampaikan informasi dan publikasi mengenai laporan hasil pemeriksaan serta kegiatan BPK kepada masyarakat melalui berbagai media.
  - b. Mengelola hubungan media massa untuk memastikan keterbukaan informasi dan meningkatkan akuntabilitas BPK di mata publik.
  - c. Menjalinkan hubungan kerja sama dengan lembaga audit internasional seperti INTOSAI dan ASEANSAL untuk berbagi pengalaman serta meningkatkan kapabilitas BPK di tingkat global.
  - d. Menyusun program kerja sama bilateral dan multilateral yang mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan BPK.
- Biro Sumber Daya Manusia  
Biro Sumber Daya Manusia (SDM) memainkan peran kunci dalam pengelolaan pegawai di lingkungan BPK. Fokus utamanya adalah pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pegawai. Tugas-tugas yang dilakukan antara lain adalah:
  - a. Merencanakan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja serta mempersiapkan proses rekrutmen yang transparan.

- b. Melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.
  - c. Mengelola system penilaian kinerja pegawai yang berbasis capaian target dan indicator kerja utama.
  - d. Menyediakan layanan kesejahteraan pegawai termasuk pengelolaan tunjangan, asuransi serta program-program kesehatan.
- **Biro Keuangan**  
Biro ini bertanggung jawab untuk mengelola seluruh aspek keuangan BPK secara akuntabel. Beberapa tugas utamanya meliputi:
    - a. Menyusun anggaran tahunan yang berdasarkan kebutuhan strategis organisasi.
    - b. Memastikan pengelolaan dan penggunaan anggaran dilakukan secara efisien serta sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
    - c. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.
    - d. Mengawasi pengeluaran keuangan serta memberikan rekomendasi untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
  - **Biro Teknologi Informasi**  
Biro Teknologi Informasi memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung operasional BPK melalui pengelolaan teknologi modern. Tugas-tugas biro ini meliputi:
    - a. Merancang dan mengembangkan aplikasi serta system informasi yang mempermudah proses kerja di lingkungan BPK.
    - b. Mengelola infrastruktur teknologi informasi seperti server, jaringan dan perangkat keras agar tetap andal dan aman Ketika digunakan.

- c. Melakukan pemeliharaan sistem secara berkala untuk memastikan keberlangsungan operasional teknologi.
- d. Mengimplementasikan sistem keamanan siber untuk melindungi data sensitive serta mencegah ancaman serangan digital.

- **Biro Umum**

Sebagai unit yang menangani berbagai kebutuhan operasional harian, Biro Umum memastikan kelancaran administrasi dan logistik di lingkungan BPK. Tugas utama Biro Umum antara lain adalah:

- a. Mengelola aset negara yang berada di bawah kekuasaan BPK agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- b. Menyediakan layanan pendukung perkantoran seperti pemeliharaan gedung, kebersihan dan pengelolaan fasilitas kerja lainnya.
- c. Mengelola dokumen dan arsip penting organisasi serta memastikan sistem tata usaha berjalan secara efisien.
- d. Mengatur logistik, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga distribusi perlengkapan kerja.
- e. Menyediakan layanan transportasi dan mengatur perjalanan dinas pegawai BPK sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- 2. **Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara**  
Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) bertanggung jawab atas pengelolaan program Pendidikan dan pelatihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pegawai BPK serta pihak terkait lainnya. Unit kerja ini terbagi ke dalam beberapa pusat yang masing-masing memiliki tugas tertentu:

- Pusat standarisasi dan evaluasi Pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara

Pusat ini bertugas untuk menetapkan standar pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan, melakukan evaluasi program pelatihan dan memastikan bahwa seluruh kegiatan Pendidikan sesuai dengan tujuan strategis BPK.

- Pusat perencanaan dan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan

Berperan dalam menyusun rencana Pendidikan tahunan dan mengelola pelaksanaan pelatihan termasuk mempersiapkan materi, instruktur dan fasilitas pendukung.

- Pemeriksaan keuangan negara pusat akademik dan teknologi pembelajaran Pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara

Unit ini berfokus pada pengembangan metode pembelajaran modern dengan memanfaatkan teknologi terkini. Hal ini mencakup e-learning dan pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan.

- Balai Pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara

Sebagai sarana pelaksanaan pelatihan, balai ini menyediakan fasilitas Pendidikan seperti ruangan kelas, laboratorium dan tempat praktik lapangan untuk mendukung pembelajaran yang efektif.

### 3. Inspektorat Utama

Inspektorat Utama (Itama) bertanggung jawab untuk memastikan kualitas dan integritas pemeriksaan serta operasional di lingkungan BPK. Fungsi utama dari Itama meliputi:

- Pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan  
Melakukan penilaian dan memberikan jaminan atas kualitas hasil pemeriksaan auditor BPK untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap standar.
- Pemeriksaan internal dan mutu kelembagaan

Melaksanakan audit internal terhadap seluruh unit kerja BPK guna mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

- Penegakan integritas

Mengawasi pelaksanaan kode etik pegawai BPK serta menangani pelanggaran yang berpotensi merusak reputasi dan kredibilitas lembaga.

4. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara

Ditama Renvaja memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan, evaluasi dan kebijakan pemeriksaan keuangan negara. Unit-unit dalam Ditama Renvaja meliputi:

- Perencanaan strategis dan manajemen kinerja  
Bertanggung jawab atas penyusunan rencana strategis dan pemantauan kinerja BPK untuk mencapai visi dan misi lembaga.
- Evaluasi dan pelaporan pemeriksaan keuangan negara  
Melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan menyusun laporan yang komprehensif sebagai umpan balik untuk peningkatan kualitas pemeriksaan.
- Analisis kebijakan pemeriksaan keuangan negara  
Melakukan kajian mendalam terkait kebijakan pemeriksaan keuangan untuk memberikan rekomendasi strategis yang mendukung pengambilan Keputusan.

5. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Ditama Binbangkum berkontribusi pada penyediaan dukungan hukum kepada BPK dan memastikan bahwa seluruh kegiatan pemeriksaan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Tugas-tugas utamanya meliputi:

- Konsultasi hukum dan kepaniteraan kerugian negara/daerah

Memberikan dukungan hukum dan mengawasi proses penyelesaian kerugian negara atau daerah yang melibatkan BPK.

- Legislasi, pengembangan dan bantuan hukum  
Mengembangkan peraturan internal yang mendukung kegiatan operasional BPK, serta memberikan bantuan hukum kepada unit kerja lainnya.

#### 6. Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN)

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) merupakan unit kerja utama di dalam struktur organisasi BPK yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap tanggung jawab keuangan dan pengelolaan negara. AKN memiliki peran penting dalam mendukung fungsi BPK sebagai lembaga pengawas eksternal yang memiliki peranan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan peraturan perundang-undangan. AKN dipimpin oleh Auditor Utama yang bertanggung jawab secara langsung kepada anggota BPK yang membawahi sektor tertentu. Setiap AKN memiliki fokus yang berbeda tergantung pada jenis atau kelompok entitas yang diperiksa seperti Kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Fungsi utama dari AKN adalah melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, kinerja dan pemeriksaan yang dilakukan tujuan khusus. Pemeriksaan ini dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi potensi masalah atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. AKN memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan persyaratan pemeriksaan keuangan negara yang ditetapkan oleh BPK sehingga hasil pemeriksaan dapat dipercaya dan memberikan nilai tambah. Selain melakukan pemeriksaan, AKN juga bertugas untuk menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi temuan, Kesimpulan, dan rekomendasi. LHP ini akan disampaikan kepada

entitas yang diperiksa, pihak terkait lainnya serta dipublikasikan untuk mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat. AKN menjadi salah satu pilar utama BPK yang mendukung upaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab sekaligus membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

#### 7. Auditorat Utama Investigasi

Auditorat Utama Investigasi (AUI) bertugas untuk melakukan investigasi mendalam atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara yang diduga memiliki permasalahan. Hasil dari investigasi ini akan digunakan untuk mendukung laporan BPK dan sebagai dasar dalam proses hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, AUDI juga memberikan keterangan ahli di persidangan guna memperkuat bukti yang diajukan.

#### 8. BPK Perwakilan

BPK Perwakilan bertugas untuk melakukan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang terletak pada BPK perwakilan yang mencakup pemerintah provinsi, kabupaten, kota serta lembaga lainnya yang berada dalam lingkup AKN V dan AKN VI. Selain pemerintah daerah, BPK Perwakilan juga mengaudit BUMD untuk memastikan pengelolaan yang efisien dan berkontribusi dalam perekonomian daerah.

#### 9. Staf Ahli

- Bidang Keuangan Pemerintah Pusat  
Staf ahli dalam bidang ini bertugas untuk memberikan analisis dan kajian komprehensif mengenai kebijakan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban pemerintah pusat.
- Bidang Keuangan Pemerintah Daerah  
Staf ahli dalam bidang ini lebih berfokus pada kebijakan yang berkaitan dengan manajemen dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.
- Bidang Manajemen Risiko

Menganalisis dan mengembangkan strategi mitigasi risiko yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara serta memberikan masukan terkait perbaikan manajemen risiko di instansi pemerintah.

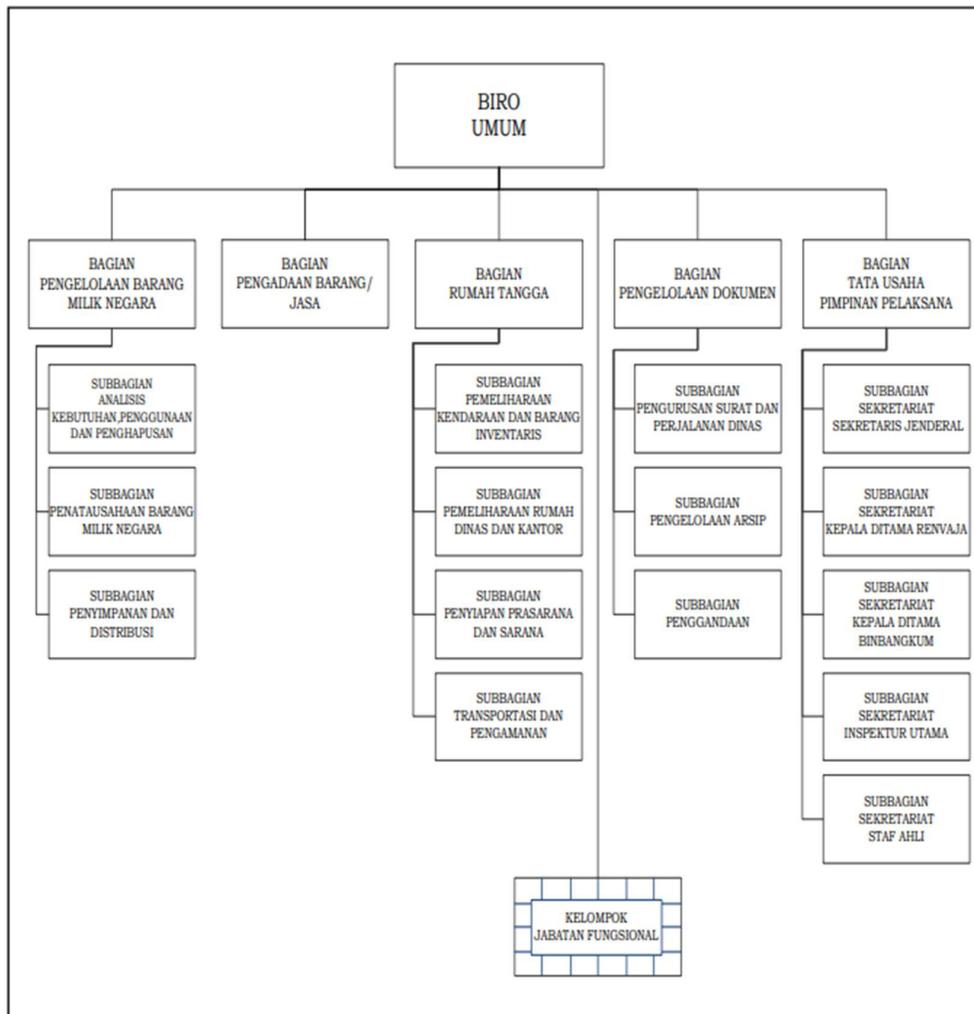
- Bidang BUMN, BUMD dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya

Berfokus pada pemantauan, evaluasi dan pemberian saran strategis terkait pengelolaan keuangan dan aset BUMN, BUMD serta entitas yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, memastikan tata Kelola yang baik dan akuntabilitas.

- Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan

Menganalisis dampak lingkungan, mendorong kebijakan Pembangunan berkelanjutan serta memastikan program pemerintah dan BUMN mematuhi prinsip tanggung jawab lingkungan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi, praktikan ditempatkan di Biro Umum, khususnya pada Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara. Unit ini memainkan peran strategis dalam mendukung kelancaran pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan BPK. Tugas utama dari subbagian ini meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN secara professional dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Untuk memberikan pemahaman lebih lanjut, berikut adalah struktur organisasi Biro Umum BPK beserta penjelasan mengenai tugas masing-masing unit:



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Biro Umum

Biro Umum terdiri atas:

1. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara

Bagian ini bertugas untuk mengelola seluruh aspek terkait Barang Milik Negara di lingkungan BPK. Dengan pengelolaan yang baik, BMN dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung operasional BPK. Bagian ini terdiri dari tiga subbagian antara lain adalah:

- Subbagian Analisis Kebutuhan, Penggunaan dan Penghapusan

Subbagian ini memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa BMN digunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tugas-tugas utamanya meliputi:

- a. Melakukan analisis kebutuhan BMN berdasarkan prioritas dan perencanaan strategis BPK.
  - b. Memastikan penggunaan BMN dilakukan secara efektif dan efisien.
  - c. Mengelola BMN yang sudah tidak layak pakai sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara  
Fokus utama dalam subbagian ini adalah pada pengelolaan administrasi dan akuntansi BMN. Beberapa tanggung jawab pentingnya mencakup:
    - a. Melaksanakan pembukuan yang akurat untuk seluruh aset milik negara yang berada di bawah BPK.
    - b. Mengelola inventarisasi BMN agar tetap terdata dan terdokumentasi dengan baik.
    - c. Menyusun laporan BMN secara berkala dan memastikan kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku.
  - Subbagian Penyimpanan dan Distribusi  
Subbagian ini bertugas mengatur logistik BMN untuk memastikan ketersediaannya sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Tugas utamanya antara lain:
    - a. Mengelola penerimaan barang yang sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan organisasi.
    - b. Menyediakan ruangan penyimpanan yang aman dan memadai untuk menjaga kualitas barang.
    - c. Mengelola distribusi BMN secara tepat waktu dan sesuai dengan rencana alokasi.

## 2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Bagian ini memiliki peran yang signifikan dalam memastikan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara yang jelas,

efektif dan sesuai dengan peraturan. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab bagian ini adalah:

- a. Mengelola layanan pengadaan melalui platform elektronik untuk meningkatkan efisiensi proses.
- b. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengadaan barang dan jasa melalui pelatihan dan pendampingan teknis.
- c. Memberikan konsultasi dan bimbingan teknis terkait pengadaan barang dan jasa kepada unit kerja di lingkungan BPK.
- d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja terkait pengadaan barang/jasa.

### 3. Bagian Rumah Tangga

Bagian Rumah Tangga memiliki tanggung jawab atas pengelolaan kebutuhan operasional harian di lingkungan BPK. Tugasnya mencakup pengelolaan sarana dan prasarana, transportasi serta keamanan. Bagian ini terbagi menjadi beberapa subbagian yaitu:

- Subbagian Pemeliharaan Kendaraan dan Barang Inventaris  
Bertugas untuk memelihara kendaraan operasional dan barang inventaris agar tetap dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan.
- Subbagian Pemeliharaan Rumah Dinas dan Kantor  
Mengelola perawatan rumah dinas dan gedung kantor untuk mendukung kenyamanan dan produktivitas pegawai.
- Subbagian Penitipan Prasarana dan Sarana  
Bertanggung jawab atas pengamanan serta pengelolaan sarana dan prasarana organisasi agar sesuai dengan tujuannya.
- Subbagian Transportasi dan Pengamanan  
Mengatur layanan transportasi dinas serta memastikan lingkungan kerja BPK aman dan terlindungi.

### 4. Bagian Pengelolaan Dokumen dan Tata Usaha

Bagian ini bertugas untuk memastikan pengelolaan dokumen organisasi dilakukan dengan baik dan mendukung kelancaran administrasi di lingkungan BPK. Bagian ini terdiri dari:

- Subbagian Pengurusan Surat dan Perjalanan Dinas  
Bertugas untuk mengelola surat-menyurat serta merencanakan perjalanan dinas pegawai secara efisien.
- Subbagian Pengelolaan Arsip  
Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan arsip organisasi baik dalam bentuk fisik maupun digital agar mudah untuk diakses dan aman.
- Subbagian Penggandaan  
Menyediakan layanan penggandaan dokumen yang cepat dan efisien untuk mendukung kebutuhan operasional unit kerja.
- Subbagian Sekretariat Sekretaris Jenderal  
Mengelola kebutuhan administratif Sekretaris Jenderal termasuk jadwal, dokumen dan koordinasi dengan unit kerja lainnya.
- Subbagian Sekretariat Staf Ahli  
Menyediakan dukungan administratif kepada staf ahli BPK untuk memastikan kealncaran pelaksanaan tugas mereka.

### **2.3 Kegiatan Umum Perusahaan**

Sebagai lembaga negara yang memiliki pran sentral dalam mengawasi dan memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel, BPK melaksanakan berbagai kegiatan umum yang memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut merupakan penjelasan mengenai berbagai kegiatan utama yang dilakukan oleh BPK:

#### **1. Pemeriksaan Keuangan**

Salah satu tugas utama BPK adalah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan berbagai entitas seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD serta berbagai lembaga yang mengelola kekayaan negara. Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Memeriksa apakah laporan keuangan telah dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan secara wajar dan transparan.
- Memberikan opini audit yang menjadi dasar pertimbangan bagi DPR, DPD dan lembaga terkait dalam membuat Keputusan strategis.

## 2. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja merupakan Upaya BPK untuk menilai sejauh mana program-program pemerintah dijalankan secara efisien, efektif dan ekonomis. Fokus utama dari pemeriksaan ini adalah:

- Mengidentifikasi apakah sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mencapai hal yang diharapkan.
- Menganalisis faktor-faktor penghambat yang dapat memengaruhi pencapaian target program.
- Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program di masa mendatang.

## 3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK untuk menjawab kebutuhan akan pengawasan yang lebih spesifik terhadap isu-isu tertentu. Beberapa fokus urama dalam PDTT adalah:

- Audit terhadap pengelolaan anggaran proyek tertentu.
- Pengawasan pengadaan barang dan jasa untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- Evaluasi komponen tambahan dalam pengelolaan keuangan negara.

## 4. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan menjadi output utama dari proses audit. LHP ini berisi:

- Temuan audit yang mencakup masalah atau penyimpangan yang teridentifikasi selama proses pemeriksaan.

- Rekomendasi yang diberikan kepada entitas terkait untuk memperbaiki pengelolaan keuangan mereka.
- Penilaian umum terhadap kinerja keuangan suatu entitas.

#### 5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

BPK tidak hanya berhenti pada penyusunan LHP, tetapi juga mengawasi tindak lanjut dari rekomendasi yang telah diberikan.

Kegiatan ini berupa:

- Monitoring pelaksanaan rekomendasi oleh entitas yang diperiksa.
- Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau pelanggaran hukum.
- Menilai efektivitas Langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh entitas terkait.

#### 6. Kerja Sama Internasional

BPK menjalin hubungan dan Kerjasama dengan lembaga audit di luar negeri serta organisasi internasional dalam rangka berbagi pengalaman, meningkatkan kapabilitas dan membangun system audit yang lebih baik di Tingkat global.

#### 7. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

BPK akan mengadakan program Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas auditor serta pegawai BPK dalam melaksanakan tugas-tugas audit dan pengelolaan keuangan negara dengan baik.